

---

# MEMAHAMI DINAMIKA POLITIK KAUM SANTRI MELALUI PENDEKATAN PROSESUAL

Oleh: *Fathul Mujib*

Ahli Sosiologi Agama Pada Jurusan Ushuluddin STAIN Pamekasan

## Abstrak

*Mengkaji dinamika politik kaum santri dapat didekati dari aneka ragam perspektif ilmu-ilmu sosial. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dan sekaligus diperhitungkan saat ini adalah pendekatan prosesual (processual approach). Pendekatan ini menitikberatkan pandangan teoritisnya pada kemampuan individu-individu sebagai social agents dalam memproduksi dan mereproduksi tindakannya berdasarkan kebebasan yang dimilikinya. Pemahaman terhadap aktor beserta tindakannya ini merupakan sarana bagaimana peristiwa-peristiwa itu terwujud. Melalui pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman bahwa dinamika politik kaum santri itu memiliki keseragaman dan keanekaragaman, serta kontinuitas dan perubahan yang berlangsung dalam serangkaian peristiwa yang saling tumpang tindih.*

**Kata Kunci:** Dinamika Politik, Kaum Santri, dan Pendekatan Prosesual.

## Pendahuluan

Memahami dinamika politik kaum santri (baca: umat Islam) tidak cukup hanya melihat dimensi perubahan yang terjadi pada setiap kurun waktu, tanpa mengaitkan hubungan yang berangkai dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan keterkaitannya satu sama lain. Memang, dengan memahami perkembangan yang terjadi pada setiap kurun waktu, dua periode atau lebih, diperoleh gambaran mengenai aspek dinamik dari gerakan politik kaum santri, yang dicirikan adanya perubahan pada setiap periode yang boleh jadi antara periode satu dengan periode berikutnya berbeda. Namun, pola

pemahaman semacam ini jelas kurang komprehensif karena hanya melihat esensi dari suatu peristiwa yang terjadi, tanpa bisa menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi sedemikian rupa. Dengan kata lain, cara pandang yang esensialis semacam itu perlu dilengkapi dengan cara pandang lain yang bersifat prosesual yakni suatu cara pandang yang memahami peristiwa atau fenomena sebagai suatu proses dari pada hasil akhir.

Tulisan ini mencoba untuk memanfaatkan pendekatan prosesual dalam memahami aspek dinamik dari gerakan politik kaum santri pada dekade terakhir yakni era reformasi. Fenomena politik kaum santri pada

---

Pemilu 1999 dan 2004 akan dijadikan unit kritisisme atau titik tolak perhatian utama dalam tulisan ini.

### Pendekatan Prosesual Sebagai Pisau Analisis

Pendekatan prosesual sebagai suatu perspektif teoritis mulai marak digunakan para ahli dalam memahami realitas sosial. Kemunculan pendekatan ini dapat dikatakan bukan merupakan fenomena baru dan terjadi secara revolusioner. Sebagaimana dikatakan Borofsky (Yunita T. Winarto, 1999: 25), bahwa munculnya penekanan kembali pada pendekatan prosesual dalam dua dekade terakhir tidak berlangsung secara revolusioner, melainkan secara evolusioner melalui tahapan-tahapan perkembangan keilmuan sosial, terutama dalam keilmuan antropologi. Oleh karena itu, ia memandang pendekatan ini sebagai suatu pendekatan yang baru, tetapi sekaligus sebagai bagian dari yang lama. Apa yang terjadi adalah perubahan dalam pengutamaan. Adanya keterbatasan dari berbagai pendekatan yang ada, khususnya yang a-historis dan a-prosesual, serta yang mengutamakan pada pendekatan esensialisme, merupakan satu dari sekian faktor pemicu munculnya penekanan dan pengutamaan pada pendekatan prosesual.

Perhatian utama pendekatan ini terletak pada peristiwa-peristiwa atau -meminjam istilah Moore-*events* yang melibatkan aktivitas atau tindakan manusia. Menurut Moore, *events* untuk proses sama dengan kategori untuk struktur. Rangkaian

hubungan antara peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan manusia inilah yang membentuk suatu proses (Yunita T. Winarto, 1999: 26).

Menurut Vayda dkk., untuk membentuk suatu proses, peristiwa-peristiwa itu harus saling terkait satu sama lain secara berkesinambungan. Sebab, tanpa keterkaitan satu dengan yang lain, maka peristiwa-peristiwa itu belum tentu membentuk suatu proses. Demikian pula, pemahaman mengenai kondisi-kondisi atau konteks yang memungkinkan berlangsungnya hubungan-hubungan antara peristiwa-peristiwa itu harus dijelaskan, karena ini termasuk hal yang menentukan bahwa suatu peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai proses (Yunita T. Winarto, 1999: 26).

Perhatian terhadap individu-individu pelaku atau aktor (*social agents*) beserta tindakannya merupakan sarana penting untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa itu terwujud. Dalam teori tindakan Max Weber, individu dipahami sebagai aktor sosial yang memiliki kemampuan bebas dalam menentukan pilihan tindakannya dan sekaligus memiliki kemampuan dalam menciptakan struktur sosial (Poloma, 2000; Johnson, 1986; Parson, 1974). Tetapi, pemilihan dan penetapan tindakan yang dilakukan individu itu melibatkan suatu proses di mana konteks lingkungan di sekitar individu memiliki pula pengaruh terhadap keputusan sang aktor. Namun demikian, tetap pada diri individu lah semua keputusan itu berada. Sejalan

---

dengan pemfokusan studi terhadap keberadaan individu sebagai aktor dan tindakannya dalam menentukan suatu proses, Otner berpendapat, "..... *the reference point for understanding a particular unfolding of events, and/or understanding the processes involved in the reproduction or change of some set of structural features*" (Yunita T. Winarto, 1999: 27).

Bertolak dari pemikiran di atas, maka tidak terlalu berlebihan apabila pendekatan prosedural itu memang cukup relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami karakter yang dinamis dari politik. Seperti dimaklumi bahwa politik itu sering dimengerti sebagai seni dalam mengelola dan membagi kekuasaan, strategi untuk menipu atau mengelabui lawan, tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti perintahnya, tindakan untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan, dan lain-lain (Ramlan Surbakti, 1999; Afan Gaffar, 2000, Maurice Duverger, 1989). Semua ini menunjukkan karakter dinamis dari politik. Secara empiris pun sudah cukup lazim diketahui bahwa dunia politik itu yang paling banyak mengalami perubahan atau pergerakan di bandingkan dengan yang lainnya.

Namun demikian, kajian mengenai dinamika politik (kaum santri) tidak mungkin dilakukan hanya dengan upaya mendeskripsikan secara sederhana peristiwa-peristiwa yang muncul pada dua periode waktu yang berbeda, dan kemudian melakukan pendugaan atau peramalan tentang apa yang terjadi di antara kedua periode tersebut

untuk mengindikasikan berlangsungnya perubahan, atau sebaliknya dipertahankannya kontinyuitas. Bila ini dilakukan, maka satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa mekanisme berlangsungnya perubahan dan proses perubahan itu tidaklah dapat diamati, dideskripsikan, dan dijelaskan.

### **Pluralitas Partai Politik Kaum Santri**

Yang dimaksud dengan kaum santri di sini adalah umat Islam yang memiliki komitmen dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, atau memiliki latar belakang pendidikan Islam yang relatif kuat, latar belakang atau pengalaman organisasi keislaman, dan membawa visi serta misi keislaman dalam proses-proses perpolitikan yang dilaksanakannya. Jadi konsep kaum santri bukan mengacu kepada komunitas umat Islam yang semata-mata memiliki ketaatan beribadah yang kemudian digunakan untuk membedakan dengan kaum priyayi dan abangan sebagaimana konsep Clifford Geertz (1983). Konsep Geertz ini sudah semakin kabur untuk dapat digunakan dalam mengidentifikasi komunalitas sosial sekarang yang sudah banyak mengalami perkembangan sedemikian rupa. Terlebih lagi, sekarang ini muncul fenomena baru dalam dunia sosial-politik berupa priyayisasi santri dan santrinisasi priyayi, demikian halnya perubahan di ranah komunitas kaum abangan (Zainuddin Maliki, 2004).

Dalam kaitannya dengan politik

kaum santri era pasca orde baru atau era reformasi ini, ada fenomena atau peristiwa yang cukup menarik di mana ada kompetisi politik di kalangan internal kaum santri dan sekaligus antar kelompok kepentingan politik. Persaingan itu tampak dari perilaku elit-elit kaum santri dalam mendirikan parpol-parpol baik yang berazas Islam maupun kebangsaan tapi mengandalkan konstituen pemilihnya dari kalangan umat Islam berdasarkan ikatan ideologi maupun kultural. Tercatat, pada pemilu 1999 parpol berbasis (ideologi/umat) Islam 19 parpol yaitu: PKB, PAN, PPP, Partai Abul Yatama, Partai Indonesia Baru, PSII, PSII 1905, PKU, Partai Islam Demokrat, Partai Keadilan (PK), PBB, PNU Partai SUNI Indonesia, Partai Umat Islam, PPII Masyumi, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Muslimin Indonesia, Masyumi Baru, Partai Ummat Muslimin Indonesia (Tempo, 4 April 2004: 28). Demikian pula pada pemilu 2004, parpol Islam masih relatif banyak.

Tindakan kaum santri mendirikan parpol Islam dalam jumlah banyak tersebut merupakan pilihan yang kesemuanya kembali kepada kebebasan santri dalam kapasitasnya sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakannya. Namun demikian, untuk sampai kepada keputusan tersebut, terdapat konteks baik berupa situasi, kondisi, dan faktor-faktor lain yang turut mewarnai keputusan tersebut. Idealitas masa lalu merupakan satu faktor yang turut memoles pertimbangan kaum santri. Setidaknya, fenomena multi partai yang muncul saat ini mirip dengan peristiwa pemilu 1955 dan 1971,

meski jumlah parpol Islam saat itu tidak sebanyak sekarang ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kaum santri terlihat masih mengidealkan kejayaan politik masa silam di mana parpol-parpol Islam yang didirikan mendapatkan dukungan riil dari mayoritas umat Islam seperti Partai Masyumi dan NU. PKB, misalnya, didirikan oleh elit-elit santri tradisional (NU) karena dipicu oleh faktor, salah satunya, keinginan untuk dapat kembali berkiprah secara signifikan dalam perpolitikan praktis sebagaimana pada pemilu 1955 (perolehan suara: 43%) ataupun 1971 (perolehan suara: 27%) (Saiful Mujani, Tempo 4 April 2004: 44). Pendirian nama-nama parpol Islam yang identik dengan nama-nama parpol saat itu, seperti masyumi Baru, PBB, dan PPII Masyumi, didorong oleh keinginan untuk mengulang kejayaan politik Masyumi tempo dulu, atau strategi untuk merebut suara-suara di kantong pendukung masyumi yang diyakini jumlahnya masih banyak.

Keinginan sebagian kaum santri untuk tetap memperjuangkan syariat Islam dalam sistem kenegaraan dan kebangsaan Indonesia masih dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Tidak sedikit parpol Islam yang masih mencarangkan Islam secara formalistik sebagai azas, visi, misi, dan platform politiknya. Dalam beberapa kasus kampanye yang dilaksanakan parpol-parpol Islam, isu-isu seputar penerapan syariat Islam masih terus disuarakan dengan target perolehan suara dari umat Islam yang seideologi. Sementara, sebagian kaum santri sudah mulai mengembangkan wawasan

---

kebangsaan atau nasionalisme-religius untuk platform parpolnya. Perubahan platform ini didasarkan kepada kenyataan bahwa isu penegakan syariat Islam sudah tidak relevan lagi untuk menarik perhatian dan minat meski dari kalangan umat Islam sendiri. Isu yang paling mendasar saat ini adalah pemberantasan KKN, penegakan sistem pemerintahan yang bersih, perekonomian, dan semacamnya. Pada saat bersamaan, umat Islam juga membutuhkan dukungan suara dari kelompok non-muslim, maka partai inklusif merupakan pilihan yang dinilai sangat rasional. Meskipun telah mengalami perubahan dari sisi platformnya, praktek dalam kampanye masih tetap saja kaum santri ini mengandalkan isu-isu keagamaan untuk memobilisir massa terutama di kantong-kantong pemilih tradisional. Hal ini cukup wajar mengingat parpol-parpol yang lain juga masih menggunakan bahasa agama sebagai strategi politiknya, karena memang kemasan ini masih cukup strategik.

Semangat kaum santri untuk ramai-ramai mendirikan parpol tidak bisa dilepaskan dari fenomena euforia politik yang melanda bangsa Indonesia pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Dalam konteks ini, kaum santri seperti terbebas dari penjara yang mengungkungnya selama bertahun-tahun. Seperti diketahui, pemerintah Orde Baru dikenal sangat otoriter, tidak bersahabat, dan tidak memberikan kelonggaran atau kebebasan yang memadai terhadap kaum santri dalam mengartikulasikan politiknya secara demokratis. Justru, sepanjang

pemerintahan Orde Baru dan bahkan sebelumnya, kaum santri seperti dianaktirikan, mereka dianiaya, ditindas, dimarginalisasikan, dan hanya dijadikan sebagai obyek penderita atau pelipur lara di saat pemerintah menghadapi kesulitan (M. Din Syamsuddin, 2001). Padahal, kontribusi politik kaum santri terhadap proses-proses perpolitikan bangsa cukup besar. Singkatnya deideologisasi, depolitisasi, dan domestikasi politik pemerintah terhadap kaum santri masih membawa implikasi riil terhadap polarisasi politik mereka.

### Pilihan Politik Kaum Santri

Salah satu fenomena menarik yang dijumpai pada pemilu 1999 dan 2004 adalah bahwa kaum santri menyalurkan aspirasi politiknya tidak saja ke parpol-parpol Islam, melainkan ke berbagai macam partai politik yang ada. Sebaliknya, parpol-parpol Islam banyak yang tidak mendapatkan dukungan riil dari kaum santri, hal ini ditandai oleh minimnya hasil perolehan suara parpol-parpol Islam tersebut dalam dua pemilu. Praktis, hanya PKB, PAN, PPP, dan PKS yang mendapatkan suara signifikan dalam pemilu. Akan tetapi, secara makro keseluruhan suara parpol-parpol Islam apabila digabungkan ternyata tidak cukup signifikan bila dibandingkan dengan perolehan suara Partai Golkar (representasi kaum nasionalis) dan PDIP (representasi kaum abangan) yang mencapai 40% lebih. Sebagian analis berpendapat bahwa pada

pemilu di era reformasi ini, popularitas parpol-parpol Islam mengalami kemerosotan (Saiful Mujani, Tempo, 4 April 2004: 44-45).

Permasalahannya, kenapa kaum santri yang jumlahnya mayoritas di negeri ini tidak menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya kepada parpol-parpol Islam yang memiliki kesamaan ideologi/agama?. Melihat perolehan suara partai Golkar dan PDI-P, dapat dipastikan bahwa tambahan perolehan suara kedua parpol yang sangat besar itu sebagian besar berasal dari kantong kaum santri. Kenyataan ini sekaligus meluluhlantahkan asumsi sebgian elit santri bahwa sebagian besar kaum santri akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada perpol-parpol Islam yang didirikannya.

Perlu diingat bahwa perolehan cukup signifikan beberapa parpol Islam yang disebut di atas itu berasal dari konstituen yang memiliki ikatan ideologis dan tradisional. PKB, mendapatkan dukungan mayoritas dari warga nahdliyin (NU). Meskipun banyak parpol yang mengatasnamakan NU seperti PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagainya, karena PKB mendapatkan dukungan resmi dari organisasi NU dan mayoritas kyai, maka perolehan suara besar tetap di tangan PKB. PAN, perolehan suaranya mayoritas berasal dari kantong Muhammadiyah (MD), karena secara ideologis partai ini sangat dekat, didirikan, dan pengurusnya kebanyakan dari warga Muhammadiyah (MD). PPP, meskipun tidak memiliki ikatan ideologis dan tradisional yang mengakar

seperti NU dan Muhammadiyah, namun sebagai partai lama sudah memiliki kader dan konstituennya sendiri. Sedangkan PKS pada pemilu 2004, sebelumnya bernama PK pada pemilu 1999 kurang mendapatkan dukungan riil, merupakan fenomena tersendiri, karena partai ini di luar dugaan memperoleh suara yang sangat signifikan sekali melampaui perolehan PAN. Partai ini memiliki kader militan yang terus dibina secara baik sehingga pada pemilu kader-kader ini dapat menjadi konstituen yang menjanjikan.

Untuk dapat menjawab masalah pluralitas aspirasi atau pilihan politik kaum santri di tingkat internal itu, bukan merupakan sesuatu yang rumit. Pluralitas partai politik di kalangan kaum santri secara otomatis akan menciptakan pluralitas aspirasi atau pilihan politik kaum santri itu sendiri. Sebab, perbedaan ideologi, kepentingan, ikatan kultural, dan selera akan berimplikasi terhadap perbedaan perilaku dalam memilih. Warga NU yang memiliki ikatan ideologis dan kultural dengan PKB dan parpol-parpol berbasis NU, dapat dipastikan menyalurkan pilihan politiknya ke salah satu parpol berbasis NU. Warga Muhammadiyah juga memiliki kecenderungan yang hampir sama, mereka sebagian besar menyalurkan suaranya ke PAN. Demikian pula warga SI, PSII, Masyumi; KAMMI dan kader-kader militan PKS; PPP; mereka semua akan menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol yang senafas dengan ideologi, ikatan kultural, dan kepentingan politiknya.

Problema yang sulit dijawab adalah

sebagian kaum santri yang menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol lain yang justru memiliki perbedaan ideologis dan ikatan kultural. Apabila dikembalikan pada analisis posesual, maka tindakan kaum santri ini merupakan pilihan bebasnya sebagai aktor sosial. Sudah barang pasti, pilihan yang diambilnya ini tidak lahir begitu saja secara *given*, melainkan melibatkan variable lain yang turut dijadikan sebagai pertimbangan. Faktor kepentingan politik dapat diidentifikasi sebagai salah satu determinan yang turut membentuk perilaku politik santri tersebut. Karena nuansa politik yang dominan itu berupa kepentingan dan kekuasaan, maka perbedaan kepentingan dan atau distribusi kekuasaan bisa mendorong kaum santri untuk tidak lagi menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol Islam, melainkan parpol yang dapat memberinya kapling kekuasaan. Perpecahan di lingkungan parpol-parpol Islam seperti PPP, PAN, PKB, PBB, dan lain-lain mendorong konstituennya melakukan tindakan politik yang cenderung kontraproduktif. Sebagian dari mereka ada yang keluar dari parpol, ada yang keluar kemudian mendirikan parpol sendiri, ada yang keluar kemudian koalisi atau bergabung dengan parpol lain seperti menyeberang ke Golkar dan PDI-P. Ketika elit-elit santri berkonflik dan keluar dari parpol Islam kemudian bergabung dengan parpol lain, menimbulkan implikasi terhadap kaum santri di level *grass roots* yang *nota bene* pengikut salah seorang elit santri itu. Di kalangan pemilih

tradisional seperti NU, hijrahnya elit santri ke parpol lain akan diikuti oleh pengikutnya yang berada di kalangan bawah. Hal ini terjadi karena ikatan kultural dan tradisional yang masih kuat mewarnai kehidupan sosial mereka.

Tidak semua kaum santri menjatuhkan pilihan politiknya ke partai lain itu semata-mata karena *itba'* (mengikuti) tindakan politik elitnya yang menyeberang, tetapi sangat dimungkinkan karena alasan sendiri yang dipandang rasional. Dalam rentang waktu satu periode pemerintahan pasca pemilu 1999, banyak kaum santri yang mulai belajar dari pengalamannya terutama dalam melihat dan menilai wakil-wakil mereka yang duduk di legislatif maupun eksekutif, mulai di tingkat daerah, propinsi, maupun pusat. Dalam banyak hal mereka melihat kemiripan antara perilaku politik elit-elit santri yang didukungnya dengan politisi dari parpol-parpol lain. Situasi dan kondisi politik, perekonomian, dan keamanan yang justru semakin memburuk dari pada sebelumnya, banyak aktor-aktor politik dari kalangan santri yang korup, tidak memperjuangkan aspirasi mereka, dan individualistik, misalnya, merupakan variable-variable yang turut mewarnai pertimbangan kaum santri dalam menentukan pilihan politiknya. Dari proses semacam ini, tidak heran apabila muncul suatu asumsi bahwa pemerintahan di tangan kaum nasionalis dan abangan itu lebih baik daripada dikendalikan oleh aktor-aktor politik dari kalangan santri. Asumsi

ini kemudian dijadikan dasar bagi kaum santri untuk tidak mendukung parpol-parpol Islam pada pemilu 2004, melainkan mereka menjatuhkan aspirasi dan pilihan politiknya kepada parpol non-Islam.

Faktor *money politics* yang memang sudah trend dalam perpolitikan menjelang pemilu, tidak kecil perannya dalam mewamai keputusan kaum santri sebagai aktor dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Pemberian uang, bantuan materiil, dan sebagainya yang diberikan oleh pengurus atau tim sukses dari parpol tertentu kerap menjadi pertimbangan utama kaum santri dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Awalnya, mereka menyalurkan pilihan politiknya ke parpol Islam, karena pertimbangan hal itu, mereka bisa merubah keputusannya untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada parpol tertentu di luar parpol Islam.

### Perubahan dan Kontinuitas

Terkait dengan fokus kajian mengenai masalah proses atau dinamika politik kaum santri, ada satu isu yang signifikan untuk ditelaah secara lebih mendalam pula yakni, bagaimana kontinuitas dan perubahan itu cenderung untuk saling tumpang tindih?. Oleh karena itu memahami perubahan dalam dinamika politik kaum santri itu, tidak mudah hanya dengan melihat sisi perubahannya saja, tanpa melihat sisi kontinuitasnya. Artinya, memahami aspek dinamis dari fenomena politik kaum santri itu dengan memisahkan satu dari yang lainnya merupakan satu kemuskilan tersendiri, atau bahkan sama sekali tidak

mungkin. Sebagaimana dikatakan Moore bahwa kedua aspek itu yakni perubahan dan kontinuitas itu saling terkait erat. Karena itu, kontinuitas tidaklah secara mudah dapat diidentifikasi dan dianalisis terpisah dari perubahan. Sekalipun demikian, melalui pendekatan prosedural akan dapat diperhatikan hal-hal apakah yang tetap bertahan dalam serangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya perubahan (Yurita T. Winarto, 1999: 31).

Dari paparan pembahasan tentang pluralitas parpol Islam dan pemilihan politik yang dilakukan kaum santri, maka dapatlah ditemukan dalam hal-hal apa politik kaum santri itu mengalami perubahan dan keberlangsungan. Keinginan kaum santri untuk terus berkiprah dalam proses-proses politik dengan membawa ide-ide keislaman dengan berbagai macam formatnya serta aspirasi politik yang berbeda merupakan bentuk kontinuitas yang terus dilembagakan atau ditindaklanjuti oleh kaum santri. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kaum santri dalam mendirikan berbagai parpol dengan nafas keislaman, ada sebagian yang secara tegas formalistik mengusung Islam sebagai azas parpolnya dan sekaligus *platform* perjuangannya, dan sebagian yang lain menempatkan Islam sebagai nilai-nilai kultural dalam parpolnya sehingga tidak harus mencantumkan Islam secara formalistik sebagai azas parpolnya. Jadi, pembentukan parpol oleh kaum santri di era reformasi ini bukan sekedar terkena imbas euforia politik, melainkan manifestasi dari kontinuitas aspek historik



---

perpolitikan kaum santri yang sudah dilakukan sejak lama yakni sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kemunculan parpol Islam dalam jumlah yang relatif banyak sekarang ini nampak memiliki kemiripan dengan parpol-parpol Islam di era Orde Lama.

Pilihan kaum santri untuk terus melanjutkan kiprahnya dalam percaturan politik karena didorong keinginannya untuk terus eksis dan menjadi aktor sosial yang memiliki peran menentukan dalam proses perpolitikan bangsa sehingga politik tidak digunakan oleh sekelompok elit berkepentingan untuk meraih kekuasaan *an sich*. Melalui media politik setidaknya kaum santri hendak berpartisipasi merumuskan format politik bangsa yang lebih demokratis. Kebobrokan politik yang ada selama ini baik pada era kepemimpinan Orde Lama maupun Orde Baru dikarenakan pengabaian bahkan pendeskriditan terhadap umat. Sebagai umat yang mayoritas peran yang dimiliki dan dimainkan mereka sangat kecil sehingga ada sebutan yang populer bahwa kaum santri itu mayoritas namun minoritas yakni mayoritas dalam jumlah tapi minoritas dalam kualitas politik. Berdasarkan pada aspek inilah kaum santri terus berkeinginan menunjukkan dirinya untuk dapat memainkan perannya dalam merumuskan formasi sosial yang demokratis, dengan catatan sistem politik yang ada pun harus demokratis, memberikan kesempatan kepada semua elemen untuk berkiprah. Dan kenyataannya secara obyektif ketika ruang kebebasan itu dimiliki, kaum santri mampu

mengartikulasikan kiprah politiknya secara signifikan. Saat ini banyak dari elit-elit santri yang menempati posisi strategis dan peran menentukan seperti Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, Abdurrahman Wahid, Yusril Ihza Mahendra, dan lain-lain.

Adapun aspek perubahan tampak pada strategi dan *platform* politik yang dilakukan kaum santri. Sekarang ini, *platform* politik kaum santri tidak lagi didominasi oleh ideologi keagamaan, melainkan sebagian dari mereka ada yang sudah mulai mengembangkan format parpol inklusif dengan wawasan ideologi kebangsaan dalam politiknya seperti yang dilakukan PKB dan PAN. Perubahan ini dilakukan karena secara empirik realitas sosial umat banyak yang mengalami perubahan akibat modernisasi pendidikan, akses pengetahuan yang sudah terbuka lebar, dan perkembangan media komunikasi dan informasi. Umat sudah semakin cerdas untuk menentukan pilihan politiknya tanpa harus rigid berpegang teguh pada komitmen ideologi atau aliran keagamaan, ikatan kultural, dan lain-lain. Karena yang dibutuhkan umat saat ini adalah parpol yang bisa menawarkan kebebasan, kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, dan keadilan. Isu-isu tradisional keagamaan relatif sudah mulai berkurang nilai strategiknya.

Perubahan tampak terlihat pula dalam peristiwa penyaluran aspirasi atau pemilihan parpol yang dilakukan kaum santri. Ketika terjadi peristiwa kebebasan yang sangat longgar bagi kaum santri untuk menyalurkan

aspirasi politiknya ke parpol-parpol yang ada tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan kekerasan sebagaimana era Orde baru, ternyata banyak kaum santri yang tidak menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol-parpol Islam. Tidak sedikit dari mereka justru menyalurkan aspirasi politiknya ke parpol seperti Golkar dan PDI-P yang nota bene bernafaskan nasionalis dan abangan. Terbukti, perolehan suara kedua partai ini sangat signifikan melampaui perolehan suara dari keseluruhan parpol Islam.

Apabila ditelaah, peristiwa di atas bukanlah kebetulan belaka. Selama ini kaum santri telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai hal seperti akses informasi, pengetahuan, komunikasi, dan pendidikan merupakan variabel yang turut mempengaruhi pertimbangan mereka dalam melakukan pemilihan politik. Dari prose belajar itu, kaum santri mengalami perkembangan dalam hal pengayaan pengetahuan tentang beragam hal terkait dengan parpol dan perilaku elitnya. Elit-elit santri selama ini kurang bisa memberikan jaminan politik yang menjanjikan seperti dalam hal keadilan, keamanan, kemakmuran, pemberantasan KKN, dan lain-lain. Dalam hal KKN, elit-elit santri hampir tidak memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Demikian pula dalam proses penciptaan perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan politik, elit santri pun dinilai masih lemah. Bahkan banyak penilaian bahwa elit-elit santri yang sudah berhasil duduk di parlemen baik legislatif maupun eksekutif mulai dari tingkat pusat sampai daerah, kurang aspiratif terhadap umat. Hal-hal semacam inilah tampaknya yang turut mewarnai

pertimbangan kaum santri untuk menjatuhkan pilihan politiknya tidak ke parpol Islam, melainkan ke parpol lain yang dinilai lebih baik.

### Penutup

Mencermati hasil kajian di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa pendekatan prosedural merupakan salah satu alternatif pendekatan teoritis yang menyajikan kemungkinan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa sosial, dalam hal ini dinamika politik kaum santri. Melalui kajian yang terfokus pada serangkaian peristiwa dalam rentang waktu tertentu dengan memperhatikan hubungan yang saling terkait antara berbagai peristiwa itu, penulis dapat memahami bagaimana perubahan dalam fenomena yang dikaji itu berlangsung. Sementara itu, dalam konteks perubahan yang berlangsung itu sendiri dapat dilihat adanya kontinuitas. Oleh karena itu, mengingat pentingnya kegunaan pendekatan ini dalam memahami suatu fenomena sosial-keagamaan, maka cukup relevan apabila ilmuwan Islam yang konsen dalam studi perubahan sosial-keagamaan turut membekali atau memperkaya diri dengan pendekatan ini, khususnya dalam memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan dinamika sosial yang akan berlangsung dalam waktu yang cepat dan singkat di masa mendatang.

---

### Daftar Pustaka

- Duverger, Maurice. 1989. *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: CV. Rajawali.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan Aswab Mahasin, cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid I, terjemahan R.M.Z. Lawang, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Mujani, Saiful. 2004. Pasang Surut Popularitas Partai Islam. Dalam *Majalah Berita Mingguan Tempo* (Edisi 29 Maret-4 April). No. 05/XXXIII.
- Parsons, Talcott. 1974. *The Structure of Social Action: a Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. New York U.S.A: The Free Press, a Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, cetakan keempat, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.
- Winarto, Yunita T. 1999. Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Budaya. Dalam *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology* (Sept - Des 1999). No. 60. Th. XXIII. Jakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan Aswab Mahasin, cetakan kedua. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, jilid I, terjemahan R.M.Z. Lawang, cetakan pertama, Jakarta: Gramedia.
- Maliki, Zainuddin. 2004. *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Mujani, Saiful. 2004. Pasang Surut Popularitas Partai Islam. Dalam *Majalah Berita Mingguan Tempo* (Edisi 29 Maret-4 April). No. 05/XXXIII.

- Parsons, Talcott. 1974. *The Structure of Social Action: a Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. New York U.S.A: The Free Press, a Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik, cetakan keempat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syamsuddin, M. Din. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos.
- Winarto, Yunita T. 1999. *Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Budaya. Dalam Antropologi Indonesia*, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology (Sept-Des 1999). No.60. Th. XXIII. Jakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.